

SKRIPSI

**PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022**



Oleh :

Siti Marlina Sari

1900024069

**Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

SKRIPSI
PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022



Oleh :

Siti Marlina Sari

1900024069

Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2023

THESIS
THE COMPARISON PROCEDURES FOR APPOINTING THE HEAD
OF GOVERNMENT OF THE SPECIAL CAPITAL REGION
ACCORDING TO LAW NUMBER 29 OF 2007
AND LAW NUMBER 3 OF 2022



Written by:

Siti Marlina Sari

1900024069

This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirments
to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nurul Satria Abdi", is written over a horizontal line.

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

NIY. 60040503

APPROVAL PAGE

**THE COMPARISON PROCEDURES FOR APPOINTING THE HEAD
OF GOVERNMENT OF THE SPECIAL CAPITAL REGION
ACCORDING TO LAW NUMBER 29 OF 2007
AND LAW NUMBER 3 OF 2022**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the
Bachelor Degree of Legal Studies at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nurul Satria Abdi", is written over a horizontal line.




NURUL SATRIA ABDI, S.H., M.H.

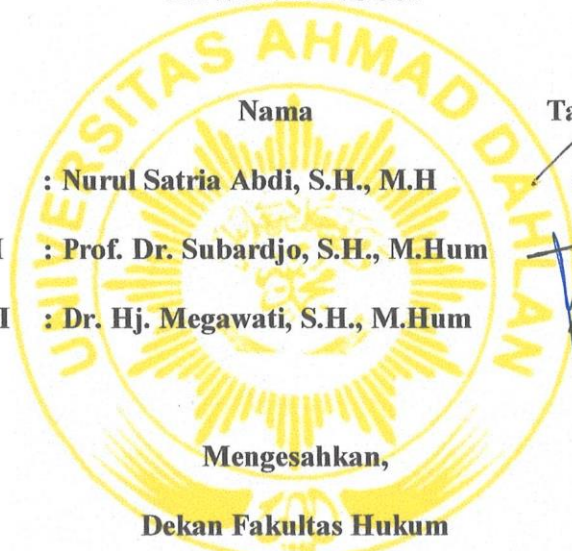
NIY. 60040503

HALAMAN PENGESAHAN
DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM


Pada Tanggal: 7 April 2023

DEWAN PENGUJI

	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: Nurul Satria Abdi, S.H., M.H	
Anggota Penguji I	: Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum	
Anggota Penguji II	: Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum	



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum



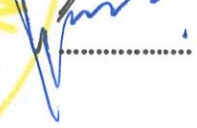
Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.
NIP. 195806071986022001

APPROVAL PAGE

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
OF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TO BE SUBMITTED AS A FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO
ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW**

At the date: April 7, 2023


THE EXAMINER BOARD

	Name	Signature
Chairman	:Nurul Satria Abdi, S.H., M.H	
Examiner I	: Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum	
Examiner II	: Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum	

Approved by,

Dean Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan


Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP. 195806071986022001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Siti Marlina Sari**
NIM : 1900024069
Email : Siti1900024069@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
ProgramStudi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Perbandingan Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 2 April 2023


Sari
SITI MARLINA SARI

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

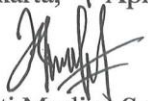
Nama : **Siti Marlina Sari**
NIM : 1900024069
Email : siti1900024069@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
ProgramStudi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Perbandingan Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut(beri tanda pada kotak):

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah kedalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 3 April 2023


Siti Marlina Sari

Mengetahui,

Pembimbing


Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

NIY: 60040503

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta Orang-orang yang sabar”

-QS. Al-Baqarah: 153-

“Tetaplah jadi dirimu sendiri dan tidak merubah dirimu untuk disukai banyak orang, karena yang menentukan bahagia atau tidaknya dari dirimu bukan dari orang lain”

(Siti Marlina Sari)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis haturkankehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Uinversitas Ahmad Dahlan. Selain itu, skripsi ini juga disusun sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yag sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Ahmad dahlan.

2. Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan serta telah menjadi dosen penguji yang memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam dan penulis sangat bangga memiliki pembimbing seperti bapak yang selalu memberikan saran dan memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membimbing dan memberikan motivasi agar semangat menyelesaikan studi.
6. Prof. Dr. Subardjo., S.H., M.Hum., selaku dosen penguji saat ujian pendadaran skripsi yang telah memberikan kelancaran serta semangat
7. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Maman dan Ibu Enisah Karim, yang Kasih dan Perhatiannya Tak Terhingga, yang selalu mendukung penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada adik tercinta, Andi Ramadhan dan Zea Humaira yang telah membangkitkan semangat penulis.
10. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan arahan dan semangat serta nasehat kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Dhini Ulfa Abdulah yang selalu menemani penulis kemanapun, sekaligus menjadi teman terbaik dalam segala hal.
12. Terima kasih kepada Septian Nur Aribah yang menjadi teman baik dari awal maba hingga saat ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Terima kasih kepada Ella Nur Apriyani yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Terima kasih kepada Melly Piranireki Umanis yang sudah menjadi keluarga selama dijogja, yang selalu memberikan suport dan semangat kepada penulis.
15. Terima kasih kepada teman-teman fakultas hukum angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan yang baik kepada penulis

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah AWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, April 2023

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Siti Marlina Sari'.

Siti Marlina Sari

DAFTAR ISI

SKRIPI	i
THESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
APROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
APPROVAL PAGE	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10

C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Konstitusi.....	20
2. Teori Pembentukan Perundang-Undangan.....	24
3. Teori Organ dan Lembaga Negara.....	30

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022

A. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota.....	44
1. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.....	44
2. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.....	49
B. Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.....	61
1. Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.....	61
2. Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA.....80

LAMPIRAN87

**PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022**

Siti Marlina Sari

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menggali kerangka hukum mengenai sistem pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Negara, sesuai UU No. 29 Tahun 2007 dan UU No. 3 Tahun 2022, serta menganalisis protokol penetapan Daerah Khusus Ibukota Negara. sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, serta pencatatan berbagai bahan bacaan dan penelusuran sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Pendekatan hukum digunakan sebagai metodologi penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2007, terdapat perbedaan yang jelas antara pendekatan pemilihan Kepala dan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022, Gubernur memegang hak prerogatif tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan baik Kepala maupun Wakil Kepala Kewenangan Ibukota Nusantara. Setelah Presiden berkonsultasi dengan DPR.

Kata kunci: Kepala Pemerintahan Daerah Khusus, Ibu Kota Negara;

**THE COMPARISON PROCEDURES FOR APPOINTING THE HEAD
OF GOVERNMENT OF THE SPECIAL CAPITAL REGION
ACCORDING TO LAW NUMBER 29 OF 2007
AND LAW NUMBER 3 OF 2022
Siti Marlina Sari**

ABSTRACT

This research sought to explore the legal framework regarding the government system in the Special Region of the State Capital, according to Law No.29 of 2007 and Law No.3 of 2022, and to analyze the protocol for establishing the Special Capital Region of the State in accordance with the previously mentioned laws and regulations.

This was qualitative research with a normative legal approach carried out through studying documents and literature, as well as recording various reading materials and tracing reference sources such as books, journals, and research reports. The research methodology employed was the legal approach.

This research showed that, in accordance with Law no. 29 of 2007, there was a clear difference between the approach to electing the Governor and Vice Governor of DKI (*Daerah Khusus Ibukota*/Special Capital Region) Jakarta and other local governments. The Provincial Government of DKI Jakarta was led by the Governor and Vice Governor who were directly elected through the election. Based on Law No. 3 of 2022, the Governor holds the sole prerogative to appoint and dismiss both the Head and Deputy Head of the Nusantara Capital Authority. After the President consulted with the DPR (*Dewan Perwakilan Rakyat*/House of Representatives).

Keywords: Head of Special Regional Government, Capital Region

